

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM SISTEM DEMOKRATIS: HAMBATAN DAN PELUANG DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Arum Imeliana Siti Tiara Maulia

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jambi

Email: imelianaarumi@gmail.com , sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstrak

Partisipasi politik perempuan memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan sistem politik yang inklusif dan representatif. Namun, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai keterwakilan yang adil dan merata dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan tantangan yang signifikan. Stereotip gender, kurangnya akses terhadap sumber daya politik, peran tradisional dalam tugas rumah tangga, diskriminasi, serta kurangnya keterwakilan dalam struktur kepemimpinan politik merupakan beberapa di antaranya. Stereotip dan bias gender masih menjadi penghalang bagi perempuan untuk maju dan berpartisipasi dalam politik, sementara peran tradisional dalam tugas rumah tangga mengurangi waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk berpartisipasi secara aktif dalam arena politik. Selain itu, kurangnya akses terhadap sumber daya politik membuat perempuan sulit bersaing secara adil dalam politik. Meskipun demikian, terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan yang inklusif semakin meningkat, didukung oleh organisasi internasional, gerakan advokasi perempuan, dan komitmen pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan memanfaatkan peluang ini dan mengatasi hambatan yang dihadapi, perempuan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender dan keadilan, serta memastikan representasi yang inklusif dalam proses pembuatan keputusan politik.

Kata kunci: Pendidikan, Kesetaraan Gender, Reformasi Politik, Partisipasi Politik Perempuan, Sistem Demokrasi

Abstrack

Women's participation in politics has a significant impact on creating an inclusive and representative political system. However, the constraints and barriers faced by women in achieving fair and equitable representation in the political decision-making process are significant challenges. Gender stereotypes, lack of access to political resources, traditional roles in household chores, discrimination, and lack of representation in political leadership structures are some of them. Gender stereotypes and biases continue to hinder women from advancing and participating in politics, while traditional roles in household chores reduce the time and energy that can be allocated to actively participate in the political arena. Additionally, the lack of access to political resources makes it difficult for women to compete fairly in politics. Nevertheless, there are opportunities that women can capitalize on in the political decision-making process. Awareness of the importance of women's representation in inclusive development is increasing, supported by international organizations,

women's advocacy movements, and government commitments to achieve gender equality. By seizing these opportunities and addressing the barriers they face, women can play a larger role in creating policies oriented towards gender equality and justice, and ensuring inclusive representation in the political decision-making process.

Keywords: Education, Gender Equality, Political Reform, Women's Political Participation, Democratic System.

Pendahuluan

Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih minim, terutama karena perempuan masih termarginalisasi secara politis, sosial, kultural, dan ekonomis. Meskipun telah terjadi beberapa peningkatan dalam hal keterwakilan perempuan dalam arena politik, tantangan-tantangan yang mendasar masih menghambat kemajuan yang signifikan. Partisipasi politik perempuan memiliki implikasi yang signifikan dalam pembentukan kebijakan dan proses pengambilan keputusan dalam sistem demokratis. Meskipun prinsip kesetaraan gender telah diakui secara luas, keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari optimal. Dalam konteks keterwakilan politik, UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2008 menetapkan keterwakilan 30% perempuan di politik. Peran parpol sebagai penyerap aspirasi politik dan kesadaran politik perempuan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi perempuan di legislatif. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan aktif perempuan di politik.

Meskipun perempuan diberi kebebasan formal untuk bergabung dengan berbagai partai politik dan organisasi politik perempuan lainnya, namun kenyataannya keterlibatan perempuan dalam politik masih terbatas pada ruang yang sangat sempit. Meskipun telah ada upaya untuk menyediakan ruang yang memadai bagi aspirasi perempuan, namun seringkali keterlibatan perempuan tersebut tidak memiliki dampak langsung terhadap kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan formal yang diberikan kepada perempuan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesempatan yang sebenarnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik yang substansial. Dalam realitas politik saat ini, keterlibatan perempuan masih sering terbatas pada bidang yang sangat tersegmentasi dan terisolasi, tanpa adanya kemandirian yang memadai. Ruang partisipasi politik perempuan masih seringkali terbatas pada isu-isu yang dianggap sebagai domain "tradisional" atau "feminin", seperti pendidikan, kesehatan, atau sosial. Hal ini mencerminkan adanya stereotip dan stigma yang masih melekat kuat dalam masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik. Perempuan sering kali dipandang hanya sebagai representasi dari isu-isu tertentu, tanpa dianggap memiliki kapasitas atau keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam diskusi dan pembuatan kebijakan yang lebih luas dan kompleks.

Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan harus ditempatkan dalam konteks transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis, di mana prinsip-prinsip inklusi dan kesetaraan diakui dan diperjuangkan secara aktif. Keterwakilan perempuan di parlemen dianggap penting untuk memastikan terpenuhinya kepentingan kaum perempuan, baik dalam pengambilan keputusan politik maupun dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan dalam mencapai keterwakilan yang proporsional di lembaga-lembaga politik.

Kesetaraan politik bagi seluruh warga, termasuk kelompok marjinal dan kaum minoritas, menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dengan meningkatnya persentase perempuan di parlemen hingga 30%, diharapkan partisipasi perempuan dalam pembangunan juga akan meningkat.

Aturan kuota 30% bagi caleg perempuan menjadi langkah reformasi penting dalam mendukung keterwakilan perempuan di politik.

Maka dari itu, penting untuk menyadari bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya masalah representasi formal, tetapi juga tentang memberikan mereka akses yang sebenarnya dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik yang substansial. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural yang menghambat partisipasi politik perempuan, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan, memperkuat jaringan dan koalisi perempuan, serta mengubah budaya politik yang patriarkis dan diskriminatif. Hanya dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana perempuan memiliki peran yang lebih signifikan dan berdampak dalam membentuk masa depan politik negara ini.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam metode ini, berbagai sumber bacaan dieksplorasi dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, yang melibatkan studi mendalam terhadap berbagai jenis dokumen seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan data resmi yang telah dipublikasikan. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dapat memberikan landasan yang kuat untuk analisis dan pembahasan dalam penulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi politik

Partisipasi politik memegang peranan penting dalam kehidupan demokratis suatu negara. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik mengacu pada aktifnya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup sejumlah kegiatan mulai dari pemilihan umum hingga ikut serta dalam kampanye politik, demonstrasi, pengawasan terhadap pemerintah, serta berbagai bentuk aktivitas politik lainnya.

Partisipasi politik merupakan fondasi utama dari sistem demokrasi. Dalam konteks demokrasi representatif, partisipasi politik biasanya terwujud melalui proses pemilihan umum, di mana warga negara memberikan suara untuk menentukan perwakilan mereka di lembaga legislatif. Namun, partisipasi politik juga dapat terjadi di luar proses pemilihan umum, seperti menandatangani petisi, menyuarakan pendapat dalam forum publik, atau bahkan dengan melakukan aksi langsung seperti demonstrasi.

Partisipasi politik tak sekadar tentang hak untuk memilih, melainkan juga melibatkan diri secara aktif dalam proses politik secara keseluruhan. Ini termasuk dalam hal pemahaman terhadap isu-isu politik, berdiskusi dengan sesama warga negara, serta turut serta dalam proses pembuatan keputusan yang bersifat demokratis. Melalui partisipasi politik, warga negara memiliki kesempatan untuk memengaruhi arah kebijakan publik serta memperjuangkan kepentingan mereka.

Tingkat partisipasi politik di suatu negara sering dianggap sebagai indikator penting dari kesehatan demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi politik menandakan tingginya tingkat keterlibatan aktif dari warga negara dalam proses politik, sementara rendahnya tingkat partisipasi politik dapat menunjukkan adanya ketidakpuasan atau rasa asing terhadap sistem politik yang ada.

Oleh karena itu, partisipasi politik bukan hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga kelangsungan sistem demokrasi. Dengan terlibat secara aktif dalam proses politik, warga negara dapat memainkan peran penting dalam membentuk masa depan negara mereka dan memastikan representasi yang adil dan inklusif bagi semua orang.

2. Peran perempuan dalam sistem demokrasi

Peran perempuan dalam sistem demokrasi sangatlah penting, terutama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Keterwakilan perempuan di parlemen serta partisipasi mereka dalam pembangunan nasional dan pengambilan keputusan negara diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pada kesetaraan gender dan keadilan, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu indikator SDGs adalah mencapai kesetaraan gender 50:50 pada tahun 2030, yang bertujuan untuk menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki di bidang politik.

Namun, meskipun langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan optimisme terhadap lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesetaraan gender, kenyataannya keterwakilan perempuan di parlemen dan dalam proses pengambilan keputusan politik masih seringkali rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, masih ada hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Selain itu, walaupun ada peningkatan jumlah perempuan di parlemen atau dalam struktur pemerintahan, tidak selalu berarti bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan secara otomatis memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan secara lebih baik. Terkadang, perempuan yang terpilih dapat terjebak dalam dinamika politik yang sama dengan rekan-rekan laki-laki mereka, yang dapat mengaburkan fokus pada isu-isu gender dan mengurangi dampak nyata dari kehadiran mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, langkah-langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik tetaplah penting, karena hal ini tidak hanya merupakan hak asasi, tetapi juga merupakan langkah yang strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memastikan partisipasi aktif perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan perempuan direpresentasikan secara adil, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Peluang perempuan dalam pengambilan Keputusan

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik adalah topik yang semakin menarik minat dalam era modern ini. Dorongan untuk mencapai kesetaraan gender dan mewujudkan representasi yang inklusif dalam proses pembuatan keputusan telah menjadi perhatian utama. Dalam tinjauan ini, kami akan menyajikan peluang-peluang yang tersedia bagi perempuan dalam mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan politik, serta dampaknya terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sejarah mencatat perkembangan signifikan peran perempuan dalam politik. Mulai dari perjuangan mendapatkan hak pilih hingga hak untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik, perempuan telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan laki-laki. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, tantangan dan hambatan masih menghadang dalam upaya memastikan keterwakilan perempuan yang adil dan merata di semua tingkat keputusan politik.

Meskipun tantangan masih ada, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif semakin meningkat. Dukungan dari organisasi internasional, gerakan advokasi perempuan, dan komitmen dari pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses politik.

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga-lembaga politik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterwakilan perempuan yang merata dapat memperkuat legitimasi lembaga-lembaga politik dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Meskipun ada peluang, tantangan-tantangan tetap ada dalam memastikan keterwakilan perempuan yang adil dalam pengambilan keputusan politik. Tantangan-tantangan tersebut meliputi bias gender, stereotip masyarakat, dan kurangnya infrastruktur dukungan untuk mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti program pelatihan dan pendidikan politik untuk perempuan, pembentukan jaringan dan koalisi perempuan, serta reformasi kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan dalam politik.

Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi, perempuan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender dan keadilan, serta memastikan representasi yang inklusif dalam proses pembuatan keputusan politik.

4. Hambatan perempuan dalam pengambilan keputusan

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik adalah elemen kunci dalam menciptakan sistem politik yang inklusif dan representatif. Namun, banyaknya hambatan yang dihadapi perempuan dalam memasuki dan bertahan dalam dunia politik masih menjadi isu yang relevan. Dalam tinjauan literatur ini, kami akan mengeksplorasi berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, serta dampaknya terhadap partisipasi politik yang merata. Hambatan yang dihadapi perempuan dalam pengambilan keputusan politik bisa menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam konteks ini antara lain:

1. Bias Gender dan Stereotip

Terdapat stereotip gender yang masih kuat dalam masyarakat yang sering kali menganggap bahwa perempuan kurang kompeten atau kurang cocok untuk memimpin dalam bidang politik. Bias ini dapat menghalangi perempuan untuk maju dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

2. Kurangnya Akses ke Sumber Daya dan Kesempatan

Perempuan sering kali menghadapi akses yang terbatas terhadap sumber daya politik seperti pendanaan kampanye, jaringan politik, dan pendidikan politik. Hal ini membuat perempuan kesulitan untuk bersaing secara adil dalam arena politik.

3. Peran Tradisional dan Tugas Rumah Tangga

Perempuan masih sering kali bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas rumah tangga dan perawatan keluarga. Hal ini membuat mereka memiliki waktu dan energi yang lebih terbatas untuk terlibat secara aktif dalam politik.

4. Diskriminasi dan Pelecehan

Perempuan dalam politik sering mengalami diskriminasi dan pelecehan, baik secara verbal maupun fisik. Hal ini dapat membuat perempuan merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk terlibat dalam kegiatan politik.

5. Kurangnya Keterwakilan dalam Struktur Kepemimpinan

Struktur kepemimpinan politik masih didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan sering kali tidak memiliki contoh atau model yang memotivasi untuk maju dalam politik.

Maka dari itu, Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan langkah-langkah seperti kampanye untuk mengatasi bias gender, program pelatihan dan pendidikan politik khusus untuk perempuan, kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan dalam politik, serta upaya untuk menciptakan lingkungan politik yang aman dan inklusif bagi perempuan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan perempuan dapat lebih mudah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan masyarakat.

Kesimpulan

Dalam partisipasi politik perempuan, kendala dan hambatan yang dihadapi merupakan tantangan signifikan dalam mencapai keterwakilan yang adil dan merata dalam proses pengambilan keputusan politik. Stereotip gender, kurangnya akses terhadap sumber daya politik, peran tradisional dalam tugas rumah tangga, diskriminasi, serta kurangnya keterwakilan dalam struktur kepemimpinan politik merupakan beberapa di antaranya.

Stereotip dan bias gender masih menghambat perempuan untuk maju dan berpartisipasi dalam politik. Peran tradisional dalam tugas rumah tangga juga

menjadi beban tambahan bagi perempuan, mengurangi waktu dan energi yang dapat mereka alokasikan untuk berpartisipasi secara aktif dalam arena politik. Kurangnya akses terhadap sumber daya politik, seperti pendanaan kampanye dan jaringan politik, juga menjadikan perempuan sulit bersaing secara adil dalam politik.

Selain itu, diskriminasi dan pelecehan yang dialami oleh perempuan dalam politik menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi mereka untuk terlibat secara aktif. Selain itu, kurangnya keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan politik menyulitkan untuk memperoleh contoh atau model yang memotivasi perempuan untuk maju dalam politik.

Namun demikian, terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan yang inklusif semakin meningkat, dengan dukungan dari organisasi internasional, gerakan advokasi perempuan, dan komitmen pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan memanfaatkan peluang ini dan mengatasi hambatan yang dihadapi, perempuan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender dan keadilan, serta memastikan representasi yang inklusif dalam proses pembuatan keputusan politik.

Referensi

- AsrizalSaiin, M. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. *JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU*.
- Muslimat, A. (2022). RENDAHNYA PARTISIPASI WANITA DI BIDANG POLITIK. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 132-136.
- Theresia Parwati, K. I. (2020). PARTISIPASI DAN KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DI LEGISLATIF MENURUT KACAMATA POLITISIPEREMPUAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 119-123.